

HARIAN KRUM
NusaBali

Penerimaan Pajak Capai Rp 383,1 Triliun

JAKARTA, NusaBali

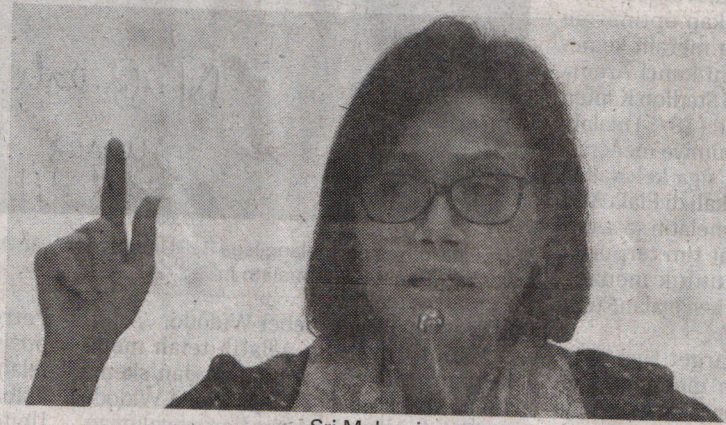
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan penerimaan pajak hingga akhir April 2018 telah mencapai Rp383,1 triliun atau lebih baik dari periode sama tahun lalu sebesar Rp345,6 triliun.

"Pertumbuhan pajak ini baik dan meningkat, terutama pajak non migas," kata Sri Mulyani dalam jumpa pers perkembangan APBN di Jakarta, Kamis (17/5).

Sri Mulyani menjelaskan realisasi penerimaan pajak ini terdiri dari pajak non migas sebesar Rp362,2 triliun dan Pajak Penghasilan (PPh) dari sektor migas Rp21,1 triliun. "Pajak non migas dan PPh migas ini lebih baik dari periode akhir April 2017 masing-masing sebesar Rp324,7 triliun dan Rp20,9 triliun," katanya.

Sejumlah penerimaan pajak utama juga tercatat tumbuh positif pada periode ini yaitu PPh Pasal 21, PPh Badan dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Dalam Negeri. Penerimaan PPh Pasal 21 tercatat sebesar Rp41,28 triliun atau tumbuh 14,77 persen, PPh Pasal 22 Impor Rp18,06 triliun atau tumbuh 28,96 persen dan PPh Orang Pribadi Rp6,25 triliun atau tumbuh 19,79 persen.

Kemudian, PPh Badan Rp90,47 triliun atau tumbuh 23,55 persen, PPh Pasal 26 Rp13,82 triliun atau tumbuh negatif 4,27 persen, PPh Final Rp36,48 triliun atau tumbuh 12,74 persen, PPN DN Rp75,37



Sri Mulyani

triliun atau tumbuh 9,53 persen dan PPN Impor Rp56,14 triliun atau tumbuh 25,07 persen. "Penerimaan dari PPh Badan yang meningkat telah memperlihatkan adanya kegiatan ekonomi yang sangat menguat, karena tidak mungkin ada pembayaran pajak bila tidak ada aktivitas yang meningkat," kata Sri Mulyani.

Dengan penerimaan pajak ini, ditambah dengan realisasi bea dan cukai sebesar Rp33,7 triliun, maka secara keseluruhan penerimaan perpajakan hingga 30 April 2018 mencapai Rp416 triliun.

Berdasarkan penerimaan sektor, penerimaan perpajakan terbesar berasal dari sektor industri pengolahan, perdagangan maupun pertambangan.

Penerimaan dari industri pen-

olahan mencapai Rp103,07 triliun atau tumbuh 11,3 persen, perdagangan Rp76,41 triliun atau tumbuh 29,4 persen dan pertambangan Rp28,51 triliun atau tumbuh 86,1 triliun.

"Kinerja sektor pertambangan yang tumbuh 86,1 persen ini karena adanya penguatan harga komoditas sejak akhir tahun 2017 dan volume produksi yang terjaga," ujarnya.

Selain itu, sektor konstruksi dan real estat Rp23 triliun atau tumbuh 12,64 persen, transportasi dan gudang Rp14,49 triliun atau tumbuh 16,6 persen serta pertanian Rp7,47 triliun atau tumbuh 21,8 persen. "Kinerja positif di transportasi dan gudang terjadi seiring adanya peningkatan ekonomi di e-commerce dan digital," kata Sri Mulyani. **ant**

Edisi

Jumat, 18 Mei 2018

Hal

17

Lima Bulan Kaling Belum Gajian✓

BANGLI, NusaBali

Gaji kepala lingkungan (Kaling) di Kecamatan Bangli, belum terbayarkan sejak lima bulan lalu. Penghasilan tetap atau siltap para Kaling ini belum terbayarkan karena masih menunggu kejelasan peraturan pencairan dana siltap.

Sumber di lapangan mengatakan, pada tahun 2017 juga pernah mengalami keterlambatan penerimaan siltap. Namun tidak sampai lewat dari bulan empat siltap sudah teerbayarkan. Besaran siltap yang diterima Kaling definitif dan Kaling persiapan berbeda. "Kaling definitif sekitar Rp 1,9 juta per bulan dan Kaling persiapan sekitar Rp 1,5 juta per bulan pada tahun 2017. Untuk tahun 2018 kami belum tahu," ungkap salah seorang Kaling di Kelurahan Kawa, Bangli, Jumat (18/5).

Sumber yang namanya minta dirahasiakan ini mengaku belum ada kejelasan kapan siltap dicairkan. "Informasinya masih dilakukan pembahasan mekanisme pencairan dana. Kami hanya bisa menunggu," imbuhnya. Sementara Sekretaris Camat Bangli, Jetet Hebiron, saat dikonfirmasi menjelaskan, sebelumnya untuk siltap para kaling di wilayah kelurahan memanfaatkan dana bantuan keuangan khusus (BKK). Dana tersebut masuk di rekening sekretariat daerah. Karena berada di wilayah kelurahan, para kaling tidak bisa menerima dana tersebut karena ada aturan beda dengan desa.

Kaling berada di bawah naungan camat. "Karena menjadi temuan, maka dilakukan pergeseran, awalnya dari dana BKK kini masuk ke kecamatan," jelasnya. Untuk bisa membayarkan siltap para Kaling, kecamatan



• NUSABALI/VEKA SRI
SEKRETARIS Camat Bangli,
Jetet Hebiron

tidak bisa ujug-ujug mengeluarkan dana. Karena harus ada payung hukum atau dasar agar dana bisa cair. Jetet mengaku sudah melakukan koordinasi dengan Badan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BKPAD) Bangli, Bagian Hukum, dan Bappeda Bangli. "Kami sudah melakukan koordinasi agar ini segera bisa dicairkan," sebutnya.

Siltap yang akan diterima para kaling sebesar Rp 2,8 juta. Setelah dipotong pajak dan BPJS menjadi Rp 2,4 juta untuk kaling definitif. Sedangkan kaling persiapan Rp 2,1 juta setelah dipotong. Jumlah tersebut lebih besar dari tahun sebelumnya. "Kalau dulu ada penghasilan ke 13, kaling karena bukan PNS, tidak bisa. Maka penghasilan dikompensasi setiap bulanya," bebernya. Jetet berencana mengajukan dana pengabdian bagi para kaling, penerimaan sebesar 3 kali penghasilan per bulan. "Seperti jasa pengabdian, apalagi banyak yang sudah mau habis masa pengabdian. Kami akan coba ajukan hal tersebut," ungkapnya seraya mengatakan masa pengabdian selama 5 tahun.  e

Kantor BNNK Gianyar ✓ Dianggarkan Rp 1,95 M

GIANYAR, NusaBali

Kantor Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Gianyar di Jalan Kebo Iwa Nomor 5, Desa/Kecamatan Blahbatuh, akan dibangun ulang. Proyek ini dikerjakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Gianyar dengan anggaran Rp 1,95 miliar dalam waktu dekat ini. Jajaran BNNK Gianyar pun harus pindah untuk sementara waktu, selama proses pembangunan.

Kepala BNNK Gianyar AKBP Made Pastika, Jumat (18/5), mengungkapkan pihaknya tengah mencari kantor sementara. Salah satu opsinya, berkoordinasi dengan Pemkab Gianyar untuk meminjam gedung. "Sudah dicariikan Pemkab. Maunya di kantor peternakan di Desa Buruan, Blahbatuh itu. Tapi kami tunggu bagaimana hasilnya," ujarnya.

Dijelaskannya, BNNK Gianyar dibentuk enam tahun lalu. Saat itu, BNNK belum memiliki kantor sehingga terpaksa harus mengontrak bangunan. "Setelah 2-3 tahun, saya berpikir, apakah akan ngontrak terus? Akhirnya saya komunikasikan dengan Pemkab Gianyar. Kami koordinasi waktu itu, jalin kerjasama kemudian mohon kantor di rumah dinas camat. Di situ ada MoU pinjam pakai," jelasnya. Di kantor sebelah selatan Puri Blahbatuh ini tercatat sudah ditempati sejak tahun 2015.

Rumah dinas Camat Blah-

batuh yang digunakan sebagai Kantor BNNK Gianyar luasnya kurang dari 5 are. Pastika menyebut, pihaknya harus menyiasati luas dan kondisi bangunan yang dirancang sebagai rumah tersebut agar mampu memenuhi kebutuhan operasional BNNK Gianyar. Contohnya, ruang yang semula difungsikan dapur dijadikan ruang kasi dan garasi disulap menjadi ruangan perkantoran. "Semua kebutuhan ruangan selama ini masih bisa dikatakan cukup. Tapi, khusus ruang tahanan, kami tidak ada di kantor. Kami biasanya nitip tahanan di Rutan Gianyar," jelasnya.

Lebih lanjut diungkapkannya, setelah sekian tahun berkantor di rumah dinas camat, pihaknya kemudian kembali berkoordinasi dengan Pemkab Gianyar maupun Pemprov Bali untuk membangun kantor baru yang lebih representatif. Akhirnya, BNNK bekerja sama dengan Pemkab Gianyar. Pembangunan gedung pun disetujui dan dianggarkan di APBD 2018. "Targetnya akhir tahun ini sudah rampung," katanya.

Terkait kepegawaian, Pastika menyampaikan, saat ini jumlahnya 22 orang terdiri dari 4 pegawai perekrutan dari Pusat, 11 dari Pemkab Gianyar dan 7 pegawai dari unsur kepolisian. Tiap tahun biasanya terdapat penambahan pegawai. Namun untuk kali ini pihaknya masih menunggu formasi dari Pusat. **nvi**

Mantan Bupati Bangli Kembalikan Uang Negara Rp 42 Juta

★ Dalam Kasus Korupsi UP Sektor Pertambangan

BANGLI, NusaBali

Mantan Bupati Bangli, I Nengah Arnawa, yang berstatus tersangka dalam kasus dugaan korupsi Upah Pungut (UP) sektor pertambangan di Bangli, mendatangi kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Bangli, Selasa (15/5). Kedatangan Nengah Arnawa yang datang seorang diri bertujuan untuk pengembalian kerugian negara.

Dikonfirmasi Kasi Pidsus Kejari Bangli, Elan Jaelani, membenarkan bila kehadiran mantan Bupati Bangli tersebut untuk mengembalikan kerugian negara. Dalam hal ini, Nengah Arnawa mengembalikan uang sebesar Rp 42 juta. Dari hasil pemeriksaan Nengah Arnawa menerima sejumlah uang dengan besaran yang bervariasi dari saat menjabat Bupati Bangli tahun 2006-2010, dengan total Rp 42 juta. "Hari ini yang bersangkutan datang untuk mengembalikan kerugian negara, namun kami belum bisa terima karena yang bersangkutan tidak didampingi penasehat hukum," ungkapnya.

Lanjut, Elan Jaelani bila pihaknya akan menunggu sampai penasehat hukumnya mendampingi. Disebutkan, akibat kasus tersebut negara mengalami kerugian Rp 927 juta, kemudian setelah ada pengembalian sisa Rp 177 juta. "Sisa Rp 177 juta setelah dipotong pengembalian dari Nengah Arnawa," ujarnya. Kemudian masih banyak penerima yang tidak mengembalikan dikarenakan yang bersangkutan sudah meninggal dan pihak keluarga tidak mampu mengembalikan.

Disampaikan bila Nengah Arnawa berencana akan mengembalikan sisa kerugian negara tersebut. "Bila ada rejeki katanya Pak Arnawa mau mengembalikan sisanya tersebut," terang Elan Jaelani. Sementara itu, untuk uang pengembalian tersebut nantinya akan masuk rekening khusus milik Kejari Bangli. Sampai nantinya ada putusan Pengadilan, kemana uang tersebut akan diarahkan.

Disinggung terkait proses hukum, Elan Jaelani menjelaskan, dalam waktu dekat kasus UP yang menjerat Nengah Arnawa ini akan dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor untuk selanjutnya proses persidangan. Ditegaskan meski sudah ada pengembalian kerugian negara, proses hukum akan tetap berlanjut. "Proses hukum tetap jalan, pengembalian sedikitnya bisa meringankan bagi yang bersangkutan," sebutnya.

Disisi lain, meksi Nengah Arnawa sudah berstatus sebagai tersangka, namun tidak ada penahanan. Yang menjadi pertimbangan



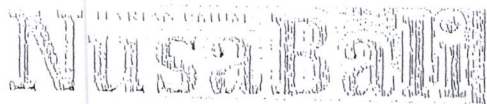
● NUSABALI/EKA SRI
Kasi Pidsus Kejari Bangli, Elan Jaelani

karena Nengah Arnawa kooperatif selama pemeriksaan. "Kami tidak melakukan penahanan karena yang bersangkutan kooperatif, setiap dibutuhkan untuk pemeriksaan selalu memenuhi panggilan," terang Elan Jaelani seraya mengatakan tidak ada pencekalan atau larangan pergi keluar daerah.

Nengah Arnawa sudah cukup lama ditetapkan sebagai tersangka, kasus terkesan stagan. Namun Elan Jaelani memastikan kasus ini akan dituntaskan segera. "Saya ingin kasus segera terselesaikan," imbuhnya.

Edisi : Rabu 16 Mei 2018

Hal : 5.



Sambungan

Seperti diketahui, penetapan Arnawa sebagai tersangka dilakukan setelah penyidik melakukan pengembangan atas perkara korupsi UP Sektor Pertambangan Bangli dengan terdakwa mantan Kadipenda Darmawan dan Dharmayudha. Dalam pengembangan, Arnawa diketahui mendatangi SK UP Sektor Pertambangan pada tahun 2006-2008 yang dibagikan kepada puluhan staf dan pejabat Dispenda Bangli serta beberapa pejabat.

Padahal kegiatan pemungutan pajak di sektor itu tidak pernah dilakukan. Dalam biaya pungutan itu, Arnawa ikut menikmati dana UP yang dibagikan oleh terdakwa Alit Darmawan dan Rai Dharmayudha. Dalam kasus ini, dua mantan Kadispeda sudah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman berbeda. Untuk AA Gede Alit Darmawan (mantan Kadipenda Bangli 2009-2010) divonis pidana penjara selama 2 tahun dan 4 bulan dan Bagus Rai Dharmayudha (mantan Kadispeda Bangli 2006-2008 yang kini sudah pensiun) divonis 2 tahun dan 8 bulan.  e

Edisi : Rabu , 16 mei 2018

Hal : 5